



# PARETO

## JURNAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PUBLIK



PARETO : Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik  
Volume 7 Nomor 1, Juli 2024  
ISSN : 2620-3456 (Media *Online*)



PARETO : Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik merupakan jurnal ilmiah yang mempublikasikan hasil-hasil penelitian empiris, studi teoritis, dan pemikiran kritis dalam Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik; meliputi kajian ekonomi pembangunan, ekonomi pertanian, fiskal dan moneter, maupun ekonomi publik dan keuangan daerah. Cakupan kajian dapat berskala lokal, nasional, maupun internasional. Dalam proses review artikel, Jurnal PARETO menerapkan sistem penelaahan tertutup dua arah (*double-blind review*), dimana nama reviewer dan nama penulis tidak diketahui (anonim). Jurnal ini dikelola oleh Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu dan diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu dengan frekuensi penerbitan dua kali dalam setahun, yaitu bulan Juni dan Desember. Jurnal ini telah teregistrasi LIPI dengan nomor ISSN [2620-3456](https://doi.org/10.262034/2620-3456).

**Penanggung Jawab**  
Dekan Fakultas Ekonomi

**Penanggung Jawab Redaksi**  
Asad Hasan, SE., M.Si

**Pemimpin Redaksi**  
Dr. H. Syafrudin AB., SE., M.Si

**Redaksi Pelaksana**  
[Dr.EllyyaRevolina.SE.M.Si](mailto:Dr.EllyyaRevolina.SE.M.Si)  
H. Jalal Ikhwan, SE., M.Si

**Dewan Penyunting**  
Dr. H. Pakri SE., M.Si (Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH)  
[Dr. Budiman Sakti, SE., M.Si](mailto:Dr.BudimanSakti.SE.M.Si) (Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH) [Rabin  
Ibnu Zainal, SE., M.Sc., Ph.D](mailto:RabinIbnuZainal.SE.M.Sc.Ph.D) (Universitas Bina Dharma Palembang)  
[Dr. Khusaini, S.Pd., MSE](mailto:Dr.Khusaini.S.Pd.MSE) (Universitas Islam Syekh-Yusuf Banten)  
[Dr. Lilis Siti Badriah, SE., M.Si](mailto:Dr.LilisSitiBadriah.SE.M.Si) (Universitas Jendral Sudirman Purwokerto)  
[Muhamad Abduh, SE., MSc., Ph.D](mailto:MuhamadAbduh.SE.MSc.Ph.D) (Universitas Bengkulu)

**Sekretariat**  
Dr. Teguh Dwiarsyah, SE., M.Si

**Operator Web**  
Winy Lian Seventeen, S.E.,M.Ak

**Alamat Redaksi**  
Program Studi Ekonomi Pembangunan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu  
Jl. Jendral A. Yani No. 1 Kota Bengkulu Telp. 0736-346132/0736-20946  
Email : [jurnalpareto@unihaz.ac.id](mailto:jurnalpareto@unihaz.ac.id) / [jurnalpareto@gmail.com](mailto:jurnalpareto@gmail.com)



## DAFTAR ISI

|  |       |
|--|-------|
| <b>Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Minimarket</b>   |       |
| Mardi Murahman, Muhammad Dimas, Rizqi Amra Muslimin, Ayub Arpan.....   | 1-11  |
| <b>INKLUSIVITAS DALAM PARIWISATA BENGKULU: TINJAUAN TERHADAP AKSESIBILITAS DESTINASI WISATA SEJARAH BAGI PENYANDANG DISABILITAS</b>                              |       |
| Wahyu Widiastuti, Dita Haryani.....  | 12-21 |
| <b>ANALISIS PENGARUH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KESEHATAN, PENDIDIKAN, DAN JUMLAH PENDUDUDK TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013-2023</b> |       |
| M Wirendy syahaji, As'ad, Fitriani Ariska, Agus Setyawanto.....  | 22-31 |
| <b>ANALISIS PEMBIAYAAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) PADA PT.BANK TABUNGAN NEGARA Tbk CABANG BENGKULU (STUDI KASUS KPR SUBSIDI)</b>                               |       |
| Ravalleny, Pakri Fahmi, Asad.....  | 32-39 |
| <b>ANALISIS PENGARUH SUB SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI BENGKULU TAHUN 2011-2021</b>  |       |
| Natanael, Asad, Teguh Dwi Arsyah .....   | 40-53 |
| <b>"Pemetaan Potensi Ekonomi Biru di Wilayah Pesisir Jawa Barat Ujung Genteng"</b>   |       |
| Venita Sofiani, Iqbal Noor.....  | 54-63 |
| <b>Analisis strategi segmentasi pasar pada konsumen pyramid bawah dalam buku "The Fortune at the Bottom of the Pyramid"</b>                                      |       |
| Venita Sofiani, Iqbal Noor.....  | 64-71 |
| <b>Pengaruh Penerapan Online Single Submission (OSS) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Dampaknya bagi Percepatan Investasi di Provinsi Bengkulu</b>             |       |
| Ariel Siswantoro, Fitriani Ariska.....   | 72-76 |



## INKLUSIVITAS DALAM PARIWISATA BENGKULU: TINJAUAN TERHADAP AKSESIBILITAS DESTINASI WISATA SEJARAH BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Wahyu Widiastuti • Dita Haryani

**Abstract.** Hak berwisata bagi penyandang disabilitas harus diwujudkan dalam bentuk destinasi wisata yang aksesibel dan inklusif atau memberikan pemenuhan dan perlindungan serta penghormatan bagi hak difabel. Destinasi wisata yang inklusif berarti pariwisata yang mempertimbangkan kebutuhan difabel dalam desain dan pembangunan fasilitasnya. Merujuk pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, Pariwisata yang inklusif harus memenuhi lima syarat yaitu adanya Adanya parkir kendaraan bagi penyandang difabel, adanya ramp atau jalur diperuntukkan bagi pengguna kursi roda, adanya toilet khusus difabel, Loket tiket yang tidak menyulitkan pengguna kursi roda, dan adanya petugas bahasa isyarat yang memudahkan interaksi dengan penyandang tuli. Komite perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang Disabilitas menambahkan empat poin lagi yaitu Adanya media informasi yang bisa diraba dan disentuh, Petugas yang khusus mendampingi difabel, sign system yang memadai dan adanya Kantin dan kafetaria yang ramah disabilitas. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana praktek inklusivitas di empat destinasi wisata Sejarah yang berada di Kota Bengkulu. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan pengelola tempat wisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bangunan Benteng Marlborough, Tugu Thomas Parr dan Rumah Pengasingan Bung Karno serta Museum Negeri Bengkulu belum ramah disabilitas karena belum memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Penambahan fasilitas pada Benteng Marlborough, Tugu Thomas Parr dan Rumah Pengasingan Bung Karno terkendala dengan statusnya sebagai cagar budaya karena dikhawatirkan mengubah bentuk asli bangunan. Sementara penambahan fasilitas untuk kelompok disabilitas terkendala pada anggaran lembaga.

**Kata Kunci:** *Pariwisata Inklusif, Kelompok Disabilitas, Destinasi Wisata Sejarah*

©2024 Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH.

---

## PENDAHULUAN

Kepariwisataan adalah seluruh kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. Wisata merupakan kebutuhan hakiki bagi semua orang yang wajib dipenuhi. Kepariwisataan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. epariwisataan diselenggarakan dengan prinsip menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal..

Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas mengatakan bahwa



negara harus memenuhi hak-hak para penandang disabilitas yang mana salah satunya adalah hak berwisata. Hak berwisata bagi penyandang disabilitas harus diwujudkan dalam bentuk destinasi wisata yang aksesibel atau memberi kemudahan bagi kemudahan dan inklusif atau memberikan pemenuhan dan perlindungan serta penghormatan bagi hak difabel. Merasa nyaman di tempat tujuan wisata merupakan hak semua orang, tidak terkecuali para penyandang disabilitas. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) bersama Kementerian terkait menggagas destinasi wisata ramah difabel atau pariwisata inklusif.

Menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (UNCRPD), istilah "inklusif" berarti bahwa penyandang disabilitas dan tanpa disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, mengembangkan potensi individu mereka, dan menggunakan keterampilan mereka untuk berkontribusi pada kebaikan bersama. Pariwisata dapat dianggap inklusif jika kelompok terpinggirkan terlibat dalam produksi, konsumsi dan menerima manfaatnya. Kelompok yang terpinggirkan dalam wisata bisa beragam, mencakup kelompok sangat miskin, etnis minoritas, perempuan dan anak perempuan, orang yang memiliki kemampuan berbeda dan kelompok lain yang tidak memiliki kekuasaan dan/atau suara (Scheyvens dan Biddulph, 2017). Jika masyarakat yang terpinggirkan berpartisipasi dalam produksi atau konsumsi pariwisata dan mereka mendapatkan manfaat, maka pariwisata dapat dianggap inklusif.

Sementara destinasi wisata yang inklusif berarti pariwisata yang mempertimbangkan kebutuhan difabel dalam desain dan pembangunan fasilitasnya. Wisata ramah disabilitas tidak hanya meningkatkan pengalaman dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, namun juga mendukung empat goals dalam Sustainable Development Goals (SDGs) dengan mengurangi ketimpangan (goals 10), mewujudkan kota dan komunitas yang berkelanjutan (goals 11), mewujudkan kehidupan sehat dan kesejahteraan (Goals 3), Pendidikan berkualitas (goals 4) serta pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (goals 8).

Bisa menikmati destinasi wisata sejarah seperti museum merupakan bentuk perwujudan dari Convention on the right on persons with disabilities (CRPD) yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada 2006. Terlebih museum didefinisikan oleh International Council of Museum (ICOM) sebagai lembaga nirlaba dan permanen dalam pelayanan masyarakat yang terbuka untuk umum, untuk tujuan pendidikan, studi, dan kesenangan. Museum memainkan peran penting dalam mendidik Masyarakat dan mewakili beragam aspek budaya melalui pameran yang mereka selenggarakan.

Museum dan tempat bersejarah pada umumnya seharusnya bersifat inklusif di mana penyandang disabilitas dapat mengakses informasi yang sama dengan Masyarakat pada umumnya. Beberapa museum terkenal di berbagai belahan dunia sudah berhasil menunjukkan dirinya sebagai destinasi wisata yang ramah difabel. Rijksmuseum dan Nxt Museum di Belanda, Parthenon, National Archaeological Museum dan national Museum of Contemporary Art di Yunani, serta National Museum di Prague Czech Republic merupakan contoh museum-museum besar yang memperhatikan kebutuhan pengunjung dengan disabilitas. Sementara museum del Prado dan Tiflogico di madrid spanyol, Smithsonian American Art Museum di Washington DC America, national gallery of prague CzechRepubli, The Mary Rose Portsmouth di UK, Museum van Loon Amsterdam, Hands on the Wall Santiago Chile, The Lovre paris, Canadian Museum for Human Rights Winnipeg Canada dan Istanbul Modern Turkey museum merupakan beberapa contoh museum yang menyambut pengunjung tunanetra atau memiliki penglihatan rendah



Di Indonesia, sejumlah destinasi wisata sejarah sudah menerapkan pariwisata ramah disabilitas antara lain Tugu Nasional dan Museum Gajah di Jakarta, dan Benteng Vredeburg di Jogjakarta, dan Museum Angkut di Malang . Broto Wijayanto, seniman yang aktif menyuarakan hak para disabilitas menyebut bahwa museum di Indonesia sudah termasuk inklusi karena telah menyediakan lift, kursi roda, ramp atau jalur khusus difabel hingga pertunjukan museum virtual. Ditambahkan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsifan DIY Monica Nur Listiyani, sudah ada juga museum yang menyediakan fasilitas bagi tuna Netra berupa bioskop bisik. Petugas bisik bertugas mendampingi penyandang tuna Netra dengan membisikkan alur cerita yang ada pada film.

Cooper et al (1995) menyatakan empat komponen yang harus dimiliki sebuah destinasi wisata agar bisa disebut inklusif. Keempat konsep tersebut adalah attraction, accessibility, amenity dan ancillary. Attraction berkaitan dengan what to see dan what to do. Apa saja yang dapat dilihat dan dilakukan oleh wisatawan di destinasi tersebut. Attraction disini berupa keindahan dan keunikan alam. Attraction inilah yang akan menjadikan sebuah objek wisata unik dari yang lain. Accessibility atau aksesibilitas adalah sarana dan infrastruktur untuk menuju destinasi. Accessibility ini identic dengan transferability, yaitu kemudahan bergerak dari satu ke tempat lain yang difasilitasi dengan adanya jalan raya, bandara dan Pelabuhan. Amenity adalah fasilitas pendukung yang bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan wisatawan selama berada di destinasi. Amenities meliputi sarana akomodasi berupa tempat penginapan dan restoran serta rest area, toilet, tempat parkir dan sarana ibadah. Ancillary berkaitan dengan ketersediaan dengan adanya organisasi atau orang-orang yang mengelola destinasi atau Destination Management Organization (DMO). Tasci et.al (2013) memetakan DMO dalam empat kelompok, yaitu unsur pemerintah, organisasi donor dan Non government organization (NGO), sector swasta dan masyarakat local.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) menyebutkan bahwa pariwisata yang ramah disable setidaknya memiliki lima kriteria sebagai berikut :

1. Adanya parkir kendaraan bagi penyandang difabel yang mempunyai ruang cukup bebas di sekitarnya, untuk memudahkan penyandang difabel keluar masuk kendaraan. Area parkir juga harus dilengkapi symbol parkir penyandang difabel yang berlaku.
2. Adanya ramp atau jalur yang memiliki bidang kemiringan maksimal tujuh derajat. Fasilitas ini diperuntukkan bagi pengguna kursi roda. Ramp harus dilengkapi fasilitas bordes yang didesain dengan tekstur kasar agar tidak licin; dilengkapi tepian pengaman, dan pegangan rambatan serta pencahayaan yang memadai.
3. Adanya toilet khusus difabel yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) No 60 tahun 2006, yaitu yang dilengkapi rambu atau symbol cetak timbul, pitu toilet geser dan lantai yang tidak licin.
4. Loket tiket dengan barrier atau pagar penghalang yang tidak menyulitkan pengguna kursi roda yang melewatinya.
5. Adanya petugas bahasa isyarat yang memudahkan interaksi dengan penyandang tuli.

Setiadi Purwanto, Ketua Komite perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang Disabilitas (KHD) menambahkan empat poin yang harus dipenuhi pengelola destinasi wisata agar lebih ramah pada penyandang disabilitas. Keempat poin tambahan tersebut adalah :

1. Adanya media informasi yang menggunakan huruf braile maupun media tactual (media yang bisa diraba dan disentuh)
2. Petugas yang khusus mendampingi difabel maupun petugas yang telah mendapat pelatihan khusus sehingga memahami kebutuhan difabel
3. Evakuasi

Tempat wisata menyiapkan tanda peringatan bahaya berupa audio maupun visual Adanya



titik kumpul untuk evakuasi

#### 4. Kantin dan kafetaria

Kantin dan kafetaria menyediakan ramp bagi pengguna kursi roda

Sementara Modul Penerapan Aspek Kemudahan bangunan Gedung Melalui Desain Universal yang dirilis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut ada tujuh prinsip desain universal yaitu (1) kesetaraan pengguna ruang, (2) keselamatan dan keamanan bagi semua, (3) kemudahan akses tanpa hambatan, (4) kemudahan akses informasi, (5) kemandiraian penggunaan ruang, (6) efisiensi Upaya pengguna, serta (7) kesesuaian ukuran dan ruang secara ergonomis.

## METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana praktek inklusivitas dalam pariwisata yang berada di Kota Bengkulu. Mengingat dalam pra penelitian diketahui bahwa banyak penyandang disabilitas terutama dari kelompok tuna Netra, tuna daksa dan tuna rungu dari belum bisa menikmati tempat wisata termasuk wisata Sejarah karena pengelola belum cukup memberikan kemudahan bagi mereka. Perwakilan dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dan Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas (PPUAD) Bengkulu menceritakan pengalaman bagaimana penyandang disabilitas belum dapat mencapai semua area dalam bangunan tanpa adanya hambatan. Pengguna kursi roda tidak bisa masuk ke museum dan Benteng Marlborough karena tidak ada jalur khusus bagi pengguna kursi roda, dan akses jalan dengan paving kerikil bisa menyulitkan pengguna tongkat/krug. Ditambahkan tidak ada papan informasi yang dilengkapi huruf braile bagi penyandang disabilitas netra dan petugas pemandu wisata dengan kemampuan bahasa isyarat bagi disabilitas rungu membuat mereka tidak bisa menikmati dan mempelajari koleksi sejarah yang ditawarkan. Hal ini sejalan dengan Bianchi et al (2020) yang menyatakan bahwa wisatawan dengan disabilitas masih menghadapi kendala dan praktik diskriminasi meskipun sudah ada sejumlah Undang-Undang dan aturan yang melindungi kepentingan kelompok ini agar bisa berwisata dengan lebih leluasa

Tercatat ada sembilan destinasi sejarah yang ada di kota Bengkulu, yaitu adalah adalah Bung Pengasingan Karno, Rumah Fatmawati, Benteng Marlborough, Tugu Thomas Parr, Tugu Hamilton, Museum Bengkulu, Masjid Jamik, Makam Sentot Alibasya dan Makam Inggris. Study ini menganalisis Lima destinasi wisata Sejarah, yaitu Rumah Pengasingan Bung Karno, Rumah Fatmawati, benteng Marlborough, Tugu Thomas Parr dan Museum Bengkulu akan dianalisis dengan menggunakan sembilan poin wisata ramah disabilitas yang disebutkan oleh Kemenparekraf/Baparekraf dan Komite perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang Disabilitas (KHD). Selanjutnya sejumlah wawancara dengan pengelola pariwisata sejarah juga dilakukan untuk mendapatkan informasi tambahan

### Temuan dan Pembahasan

Pengelolaan Bangunan Benteng Marlborough, Tugu Thomas Parr dan Rumah Pengasingan Bung Karno

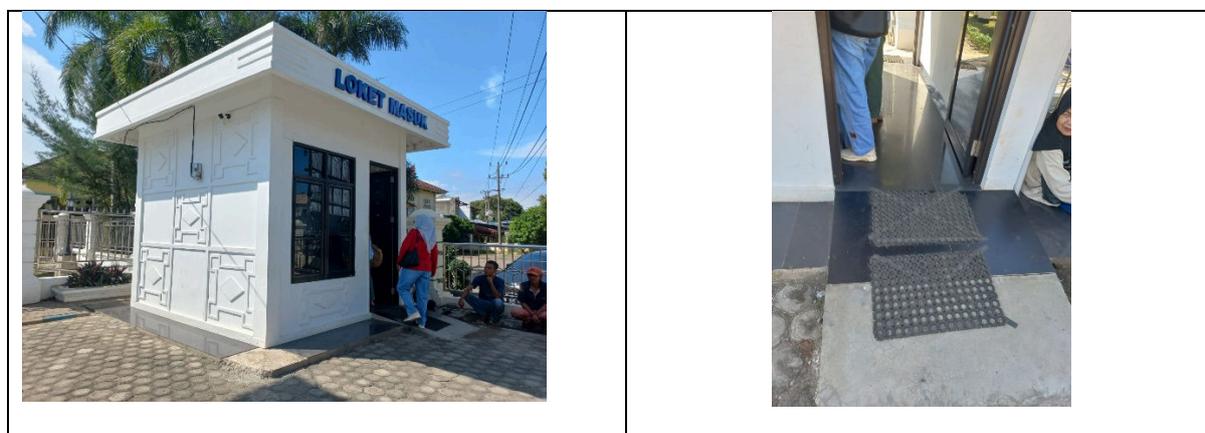
Bangunan Benteng Marlborough, Tugu Thomas Parr dan Rumah Pengasingan Bung Karno merupakan tiga dari enam cagar budaya yang berada di bawah pengelolaan Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah VII Bengkulu- Lampung. BPK adalah unit pelaksana teknis (UPT) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan teknologi Indonesia yang berada di daerah yang bertugas melaksanakan [elestarian cagar budaya dan objek pemajuan



kebudayaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknomogi RI No 33 tahun 2022, fungsi BPK adalah : (1) pelaksanaan perlindungan cagar budaya, objek yang diduga cagar budaya, dan objek pemajuan kebudayaan; (2) fasilitasi pemanfaatan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan; (3) pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya, objek yang diduga cagar budaya, dan objek pemajuan dan kebudayaan; (4) pelaksanaan pendataan dan pendokumentasian cagar budaya, objek yang diduga cagar budaya, dan objek pemajuan kebudayaan; (5) pelaksanaan pemantauan dan evaluasi; (6) pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Berdasarkan pengamatan terhadap bangunan Benteng Marlborough dan Rumah Pengasingan Bung Karno dapat dilihat bahwa ketiga bangunan tersebut belum memiliki tempat parkir khusus untuk penyandang disabilitas, oleh karena itu penyandang disabilitas terutama tuna daksa yang harus menggunakan mobil khusus harus bercampur dengan pengunjung umum. Berlainan dengan Benteng Marlborough dan Rumah Pengasingan Bung Karno yang berada di satu Kawasan tersendiri, letak Tugu Thomas Parr yang berada tepat di pinggir jalan sehingga pengunjung dengan kendaraan bisa parkir di mana saja termasuk di depan tugu.

Loket hanya ditemui di Benteng Marlborough dan Rumah Pengasingan Bung Karno, sementara untuk masuk ke Tugu Thomas Parr perlu membayar retribusi sehingga tidak memiliki loket khusus. Loket Benteng Marlborough cukup luas tanpa barrier sehingga memudahkan penyandang disabilitas dengan kursi roda. Sementara loket di Rumah pengasingan Bung karno berupa bangunan kecil dengan pintu yang sempit, yang tidak memungkinkan pengguna kursi roda masuk ke dalam. Setelah membayar tiket, pengunjung melewati jalan kecil dengan paving berlubang-lubang. Menurut petugas, main gate yang lebih lebar bisa dibuka khusus untuk penyandang pengguna kursi roda.



Gambar 1 . Loket di Rumah pengasingan Bung Karno

Pengelola Benteng Marlborough telah membuat ramp sepanjang dua meter di area entrance agar pengguna kursi roda bisa masuk ke area benteng. Namun, meskipun bisa masuk ke area benteng, mereka belum bisa masuk ke ruangan-ruangan yang ada karena terhalang anak tangga yang ada di setiap pintu masuk yang ukurannya juga tergolong sempit untuk dilewati kursi roda. Sementara itu di Rumah Pengasingan Bung Karno ramp sudah dibuat mulai entrance hingga area taman belakang, namun letak dan bentuknya masih menyulitkan pengguna. Selain itu ramp juga tidak dibuat di entrance bangunan rumah, sehingga penyandang tuna daksa tidak bisa naik dan menikmati isi rumah. Sama halnya dengan benteng Marlboroygh

dan Rumah pengasingan Bung Karno, Tugu Thomas parr juga tidak memiliki ramp sebagai sarana yang memudahkan pengunjung dengan alat bantu jalan masuk ke dalam area tugu.



Figure 2 . main entrance di Benteng Marlborough (kiri) , Rumah pengasingan Bung karno (tengah) dan Tugu Thomas Parr (kanan)

Toilet adalah salah satu fasilitas pendukung yang dibutuhkan demi kenyamanan pengunjung pengunjung. Benteng Marlborough dan Rumah pengasingan Bung Karno sudah dilengkapi dengan fasilitas toilet, namun belum sesuai dengan standar Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2017. Peraturan yang dimaksud menyebutkan bahwa toilet yang ramah disabilitas setidaknya berdimensi 152,5cm x 227,5cm dengan pintu paling sedikit selebar 90cm. di dalam toilet juga perlu disediakan lampu alarm (panic lamp) dan pegangan rambat untuk memudahkan pengguna kursi roda berpindah posisi dari kursi roda ke atas kloset atau sebaliknya



Gambar 3. Pintu Masuk Toilet di Benteng marlborogh (kiri) dan Rumah Pengasingan Bung Karno (Kanan)

Baik Benteng Marlborough dan Rumah Pengasingan Bung Karno memiliki petugas pemandu wisata yang bertugas mendampingi wisatawan dan memberikan penjelasan seluk beluk tempat wisata di mana mereka bertugas. Namun begitu, baik Benteng Marlborough dan Rumah Pengasingan Bung Karno hanya memfasilitasi keperluan wisatawan tanpa kendala fisik. Pemandu wisata Benteng Marlborough dan Rumah Pengasingan Bung Karno belum dilengkapi dengan ketrampilan pendampingan khusus untuk wisatawan tuna rungu, tuna wicara dan tuna Netra. Akibatnya, wisatawan dengan kekurangan wicara, dengar dan lihat tidak

bisa menikmati sekaligus belajar dari display yang ada di kedua tempat wisata Sejarah tersebut. Selain itu, wisatawan tuna Netra, juga tidak difasilitasi dengan media informasi dengan huruf braille. Mereka hanya bisa mendengarkan penjelasan pemandu wisata tanpa bisa menyentuh dan meraba display atau koleksi yang ada.

Pengelola Benteng Marlborough dan Rumah Pengasingan Bung Karno memahami perlunya Sign system sebagai petunjuk, peringatan dan larangan bagi pengunjung. Di beberapa titik, di kedua destinasi tersebut dilengkapi dengan sign information yang menginformasikan nama gedung dan fasilitas, sign direction yang mengarahkan menuju ke suatu tempat serta sign regulation yang menginformasikan apa saja yang tidak boleh dilakukan pengunjung. Namun begitu Sign system yang digunakan belum mengikuti standar seperti tanda larangan untuk tidak mendekati diorama yang dibuat dengan warna dasar putih, sementara sign regulation seharusnya dibuat dengan warna dasar orange untuk warning dan kuning untuk caution.



Gambar 4 : regulation sign di benteng Marlborough

Fasilitas amenity untuk memenuhi kebutuhan dan kenyamanan pengunjung berupa kantin yang tidak oleh pengelola Benteng Marlborough, Tugu Thomas Parr dan Rumah Pengasingan Bung Karno. Namun begitu, pengunjung tidak akan kesulitan bila memerlukan refreshemen berupa makanan dan minuman karena pengunjung bisa memperolehnya di luar kawasan wisata.

Kepala BPK wilayah VII, Nurmatias, mengakui bahwa Bangunan Benteng Marlborough, Tugu Thomas Parr dan Rumah Pengasingan Bung Karno belum ramah bagi penyandang disabilitas karena belum accessible untuk penyandang disabilitas. Sesuai UU No 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya penambahan fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas di bangunan cagar budaya tidak bisa dilakukan karena dikhawatirkan akan mengubah keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya dan atau teknologi pengerjaan. Untuk menambahkan fasilitas seperti ramp di dalam bangunan Benteng dan Rumah pengasingan Bung karno, pengelola cagar budaya harus meminta persetujuan tim ahli cagar budaya dan tim ahli pelestarian. Nurmatias menambahkan, banyak bangunan cagar budaya di Indonesia yang hingga kini belum ramah disabilitas karena penambahan fasilitas untuk penyandang disabilitas akan mengubah ciri asli dari bangunan. Nurmatias mencontohkan Candi Borobudur yang sudah masuk situs bersejarah dunia sekalipun belum inklusif lingkungan karena pengguna kursi roda baik karena alasan kecacatan maupun usia tidak bisa naik hingga ke candi.

Pengelolaan Museum Provinsi Bengkulu

Museum Provinsi Bengkulu dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Museum Bengkulu yang berada di bawah koordinasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu.



Museum Negeri Bengkulu memiliki fungsi (1) melakukan pengumpulan, perawatan, penyajian benda bernilai Sejarah budaya dan ilmiah, (2) melaksanakan urusan perpustakaan dan dokumentasi ilmiah, (3) memperkenalkan urusan dan menyebarluaskan hasil penelitian koleksi, (4) melaksanakan bimbingan edukatif cultural tentang benda yang bernilai Sejarah, budaya dan ilmiah, serta (5) melaksanakan urusan tata usaha.

Berdasarkan observasi pada bangunan fisik Museum negeri Bengkulu dapat diketahui bahwa bangunan museum yang berdiri sejak 1987 ini memiliki tampilan yang mengadopsi bentuk tipologi dari rumah adat Bengkulu yaitu Bubungan Lima. Bentuk Bubungan Lima sendiri mempunyai model seperti rumah panggung yang ditopang oleh beberapa tiang penopang. Dengan model bangunan seperti itu, maka pengunjung harus menaiki tangga untuk dapat masuk ke area display koleksi yang ada di lantai dua. Karena bangunan tidak dilengkapi dengan lift atau ramp, akibatnya pengunjung yang menggunakan tongkat dan kursi roda akan kesulitan naik, dan hanya bisa menikmati sedikit koleksi di lantai dasar. Loket pembelian karcis masuk juga berada di lantai dua. Meskipun loket cukup luas tanpa barrier, namun tetap saja membuat penyandang tuna daksa tidak bisa mengakses loket sendiri tanpa bantuan yang lain.



Figure 5. Main entrance Museum Negeri Bengkulu

Area parkir di Museum Negeri Bengkulu memiliki lahan yang cukup luas, namun masih berlantaikan tanah dan bebatuan kerikil yang membuat kesulitan pengunjung khusus pejalan kaki dan pengguna kendaraan roda. Di area parkir belum ada petunjuk arah parkir baik untuk pengunjung umum maupun khusus pengunjung penyandang difabel.

Petugas museum juga belum ada yang secara khusus bertugas mendampingi pengunjung difabel, termasuk petugas untuk menjelaskan koleksi museum dengan bahasa isyarat. Oleh karena itu pengunjung tuna rungu dan tuna wicara hanya bisa melihat koleksi tanpa bisa berdialog dengan petugas bilamana mereka menginginkan penjelasan tentang koleksi yang didisplay. Sementara pengunjung Netra hanya bisa mendengarkan tanpa bisa menyentuh dan meraba koleksi yang umumnya memang tidak boleh disentuh.



Gambar 6. Sign information untuk menjelaskan koleksi di Museum Negeri Bengkulu

Museum negeri Bengkulu menyediakan toilet untuk kenyamanan pengunjung. Meski toilet sudah dibedakan berdasarkan jenis kelamin pengguna, namun pengelola belum menyediakan toilet yang bisa digunakan pengunjung disabilitas karena jarak toilet dengan gedung museum yang terpisah dan tidak adanya akses jalur kursi roda akan membuat kesulitan penyandang difabel khususnya tuna daksa untuk menjangkaunya. Sementara untuk fasilitas penunjang kenyamanan berupa kantin tidak disediakan oleh pengelola. Pengunjung Museum bisa menikmati makanan dan minuman yang dijual pedagang di sekitar kompleks museum atau di area perkantoran belakang gedung museum yang jaraknya cukup jauh.

Sign system di Museum negeri Bengkulu sudah cukup baik, akan tetapi masih belum memenuhi standar sign system yang seharusnya. Hal yang paling nampak terlihat adalah belum adanya petunjuk-petunjuk arah mulai dari gerbang masuk parkir sampai ke dalam gedung dimana display-display sejarah dipajang. Seharusnya display-display sejarah yang diajari di gedung museum juga diklasifikasi berdasarkan jenisnya agar memudahkan pengunjung ketika memerlukan informasi tertentu

Kepala museum negeri Bengkulu, Mardian Sonpri, mengakui bahwa museum yang dipimpinnya masih jauh dari kategori ramah disabilitas. mengelola museum memerlukan pendanaan yang tidak sedikit. Selama ini museum negeri Bengkulu masih berkuat pada bagaimana mengelola uang untuk melakukan pemeliharaan koleksi yang sangat mahal. Oleh karena itu banyak rencana-rencana besar museum yang tidak bisa direalisasikan misalnya mengadakan pameran rutin yang membuat Tingkat kunjungan meningkat hingga mengubah baangunan museum agar lebih ramah pengunjung yang beragam

## SIMPULAN

The management of historical tourist destinations in Bengkulu has not met the standards of inclusive tourism, as it has not implemented the five criteria set by the Ministry of Tourism and Creative Economy/Tourism and Creative Economy Agency (Kemenparekraf/Baparekraf) and the four additional criteria from the Committee for the Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities. To make the Fort Marlborough Building, Thomas Parr Monument, and Rumah Pengasingan Bung Karno disability-friendly tourist destinations, the Bengkulu Region VII Cultural Preservation Center must obtain approval from a team of experts in cultural heritage preservation. There are concerns that the status of these cultural heritage buildings could be affected by adding facilities for people with disabilities, potentially altering their original characteristics. Additionally, the UPTD of the Bengkulu State Museum acknowledges that the museum it manages is not yet disability-friendly and has stated that the addition of necessary facilities requires a significant budget. Therefore, tourist destination managers need to use brainstorming methods with associations of people with disabilities to identify their needs and create more inclusive tourist destinations..



## DAFTAR PUSTAKA

- Bianchi, P., Cappelletti, GM., Mafrolla, E., Sica E., Sisto, R. 2020. Accessible Tourism in natural park Areas: A social network analysis to dicard barriers and provide information for people with disabilities. *Sustainability* 2020, 12 (23). <https://doi.org/10.3390/su12239915>
- Cooper, Fketcher, J., Gilbert, D., & Wanhill, S. (1995). *Tourism, Priciples and Practice*. London: Logma
- Enervon. 2023. 10 daftar tempat Wisata Keren Ini Ramah Disabilitas Lho. Retrieved from 10 Daftar Tempat Wisata Keren Ini Ramah Disabilitas Lho - Enervon C
- Envision. 2024. The Guide To Exploring Accessible Museum Around The World. Retrieved from The Guide To Exploring Accessible Museums Around The World ([letsenvision.com](https://letsenvision.com))
- IGLU Cruise. 2023. Top 10 Global Disability-Friendly Tourist Destination. Retrieved from Top 10 Global Disability-Friendly Tourist Destinations - Iglu Cruise Blog
- Kememparekraf/Baparekraft RI. 2021. Fasilitas Ramah Difabel di Destinasi Wisata. Retrieved from Fasilitas Ramah Difabel di Destinasi Wisata ([kemparekraf.go.id](https://kemparekraf.go.id))
- Hasanudin, Ujang. 2023. Museum Diorama dan Sangiran ramah Difabel, Koleksi Bisa Disentuh hingga Ada Bioskop Berbisik. Retrieved from Retrieved from <https://pendidikan.harianjogja.com/read/2023/12/16/642/1158419/museum-diorama-dan-sangiran-ramah-difabel-koleksi-bisa-disentuh-hingga-ada-bioskop-bisik>
- Rudiana, Pito Agustin. 2018. Fasilitas Apa saja Yang Diperlukan Difabel di tempat Wisata. Retrieved from <https://difabel.tempo.co/read/1160004/fasilitas-apa-saja-yang-diperlukan-difabel-di-tempat-wisata>
- Ningsih, Widya Lestari. 2024. Aturan pemugaran bangunan dan benda peninggalan Sejarah. Retrieved from <https://www.kompas.com/stori/read/2024/01/25/220000879/aturan-pemugaran-bangunan-dan-benda-peninggalan-sejarah>
- Scheyvens Regina and Biddulph Robin (2017): *Inclusive tourism development, Tourism Geographies*, DOI: 10.1080/14616688.2017.1381985
- Tasci, Asli D.A.; Semrad, Kelly J; Yilmaz, Semih S. 2013. *Community Based Tourism Finding The Equilibrium In Comcec Context. Setting the Pathway for the Future*. Nakara : COMCE Coordination Office

